

183

# COMMUNITY POLICING DI INDONESIA DAN JEPANG SUATU STUDI PERBANDINGAN

Oleh : Drs. Ansyad Mbai.

## APA DAN BAGAIMANA COMMUNITY POLICING ITU ?.

The police can not protect the public by they own unaided effort Crime investigation are not very effective in solving crimes. Generally crimes are solved because offenders are immediately apprehended or some one identifies them. This means that, in order to solve crime, the police must obtain information from the resident of community where crime occur. But if resident are hostile and suspicious of police, citizens are less likely to provide information.

Terjemahannya kira-kira sebagai berikut Polisi sendiri tidak dapat melindungi masyarakat tanpa bantuan masyarakat. Penyidikan kejahatan oleh polisi tidaklah begitu efektif dalam mengungkap kasus kejahatan. Umumnya kasus kejahatan terungkap karena sipelaku tertangkap oleh anggota masyarakat atau karena seseorang dapat mengidentifikasi sipenjahat dan melaporkannya pada polisi. Ini berarti bahwa untuk mengungkap kejahatan, polisi harus mendapatkan informasi dari masyarakat di mana kejahatan itu terjadi. Tetapi bila masyarakat takut/benci dan tidak percaya pada polisi, mereka tidak akan memberi informasi.

Atas pertimbangan di atas Community oriented policing (community policing) kini telah menjadi topik pembicaraan hangat sebagai pemecahan atas masalah Binkamtibmas dan diharapkan akan dikembangkan di dalam operasi kepolisian di semua negara di dunia.

Central premis dari community policing adalah bahwa masyarakat harus memainkan peran secara lebih aktif dan terkoordinasi dalam menangani masalah Kamtibmas. Masyarakat harus tampil sebagai Co-producer dari Polisi dalam Binkamtibmas. Dengan demikian maka polisi harus memberi jalan/wadah bagi pelibatan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertibanan.

Namun sejauh itu tidak ada definisi community policing. Kita hanya dapat melihat berbagai macam bentuk community policing di banyak negara. Di Australia, kepolisian telah mengembangkan community policing di hampir semua wilayah dengan nama neighbourhood watch. Di Kanada, polisi mengembangkan Zone base team policing. Di Norwegia, polisi direorganisasi dengan menempatkan town district Police post. Di Denmark, polisi ditugaskan memberi

pelajaran/kursus di bidang keamanan/keselamatan, pencegahan kejahatan, dan pencegahan penyalahgunaan obat berbahaya kepada anak-anak sekolah untuk membina hubungan baik antara polisi dan remaja. Di Indonesia sejak 1960 telah menerima ide *community policing* sebagai cara terbaik dalam Binkamtibmas. Ini terlihat dengan terbentuknya lembaga baru dalam struktur organisasi Polri yaitu Bimmas. Berbagai bentuk kegiatannya adalah; Binkamswakarsa, Binkamarda, Bin Polsus, Binkamra, Binsatpam dan lain-lain.

Program menonjol dari bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah: Bimmasstral dan Siskamling. Program-program tersebut kini sedang dicoba untuk lebih dioptimalkan dan didinamisasikan dengan strategi pembangunan Infra struktur Penanggulangan Kriminalitas yang sebenarnya tidak lain adalah suatu bentuk *community policing*.

Dengan demikian Polri telah masuk dalam jajaran *community policing* sebagaimana kepolisian di kebanyakan negara-negara maju.

Pengalaman beberapa negara maju dalam menerapkan *community policing* menunjukkan bahwa kunci utama keberhasilan *community policing* adalah *redeployment* (penataan penempatan) personil polisi sehingga dapat memungkinkan interaksi di antara polisi dengan masyarakat secara teratur, terus-menerus, dan terutama adalah interaksi yang bersifat *non-emergency*.

Ini dilakukan melalui patroli jalan kaki dan pos polisi tetap sehingga polisi lebih dikenal kehadirannya di tengah masyarakat. Pelaksanaan *community policing* melalui *reorientasi* dari pada patroli ini sedang berlangsung dalam berbagai macam cara. Perubahan paling mengesankan adalah *redeployment* (penataan kembali) dari pada personil patroli dari sistem patroli yang berorientasi pada patroli berkendaraan bermotor beralih ke sistem patroli yang berorientasi pada penyebaran pos tetap (penempatan personil patroli secara relatif permanen pada tempat/daerah tertentu). Cara ini disebut "*Mini-station*" di Detroit, "*shopfront*" di Australia, "*Neighbour-hood-Police-Post*" di Singapore, dan "*Koban*" di Jepang.

Koban di Jepang dan *Neighbourhood Police Post* (NPPs) di Singapore merupakan Pos Patroli tetap atau disebut juga dengan "*miniatur police station*" *mengemban* tugas yang mencakup seluruh aspek Binkamtibmas *kecuali* penyidikan kejahatan (*criminal investigation*). Konkritnya tugas mereka adalah; patroli jalan kaki, patroli bersepeda angin, menerima laporan/pengaduan, memberi bantuan/pelayanan, memberi informasi/petunjuk tentang arah jalan atau alamat kepada yang memerlukan, mengadakan kontak dengan asosiasi pencegahan kejahatan (*crime prevention association*), dan membina kontak-kontak pribadi (*personal contact*) dengan masyarakat.

Menurut hasil penelitian (Research study) yang dilakukan oleh Prof. Jerome. H. Skolnich dan Prof. David H Bayley atas permintaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, bahwa penerapan community policing yang paling sukses adalah seperti apa yang telah dicapai oleh kepolisian Jepang dengan mengembangkan Koban sebagai basis dari semua operasi kepolisiannya.

Sistem Koban ini telah ditiru oleh kepolisian Singapore dengan mengembangkan Neighbourhood Police Posts (NPPs).

Laporan penelitian mereka ini telah diterbitkan oleh National Institute of Justice, USA pada Mei 1988 dengan didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi, pengalaman operasional di lapangan, dan pendapat para ahli di bidang ini. Dalam laporan tersebut mereka mengemukakan bahwa community policing dapat dikatakan ada hanya apabila telah dilakukan program-program nyata yang dapat menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat. Praktek-praktek dengan cara lama tidak dapat dikatakan sebagai community policing karena keinginan/tujuan mereka adalah mendapat dan memanfaatkan keterlibatan masyarakat lebih besar.

Dari pengalaman penelitian mereka tentang pelaksanaan community policing oleh kepolisian di 4 benua mereka menemukan adanya 4 aspek yang harus diperhatikan kalau kita ingin benar-benar melaksanakan community policing (yang oleh Polri dikenal dengan IPK) dan

tidak sekedar berbicara tentang community policing.

Ke 4 aspek itu adalah :

1. Organize community based prevention (melaksanakan upaya pencegahan kriminalitas berdasarkan potensi dan keadaan masyarakat setempat).
2. Reorient patrol activity to emphasize non emergency servicing (reorientasi, kegiatan patroli dengan menekankan pada pelayanan non emergency).
3. Increase accountability to local communities (meningkatkan kepercayaan masyarakat setempat kepada polisi).
4. Decentralized command (desentralisasi komando dalam pelaksanaan patroli).

Berdasarkan pada sudut pandang inilah penulis mencoba melihat bagaimana pelaksanaan community policing di Indonesia atau yang kini kita kenal dengan IPK.

Untuk itu penulis mengambil kasus Jepang (sebagai pembanding) yang dikenal dengan Kobannya sebagai model community policing yang paling efektif di dunia menurut ICPO. Pengakuan tersebut didasarkan pada International Comparison of the clearance rate (perbandingan internasional dari clearance rate) terhadap kasus pembunuhan (homicide) dan perampokan (robbery) pada tahun 1977 s/d 1986. Di situ terlihat bahwa Jepang menempati peringkat tertinggi dibandingkan dengan kepolisian negara maju lainnya seperti Jerman

Barat, Inggris dan USA. Sebaliknya angka Crime rate Jepang menempati peringkat terbawah.

Ada 2 pertanyaan terhadap perbandingan ini. Yang pertama tentu, mengapa angka clearance rate yang dibandingkan hanyalah pembunuhan dan perampokan? Jawabannya adalah bahwa kedua kasus ini relatif tidak ada dark numbernya karena korban/pihak yang dirugikan pasti melapor ke polisi. Dengan demikian hanya kedua kasus inilah yang objektif untuk dibandingkan.

Yang kedua; adalalah mengapa tingginya angka clearance rate dan rendahnya angka crime rate dijadikan ukuran efektifitas community policing yang berarti pula efektifitas "Koban system? Keberhasilan mencapai angka clearance rate yang begitu tinggi, biasanya berkaitan langsung dengan efektifitas sistem penyidikan kejahatan. Di Jepang, begitu terjadi kasus pembunuhan atau perampokan, segera dibentuk semacam Posko (investigation head-quarter). Penyidikan dilakukan dalam 2 arah :

1. Penyidikan di daerah tempat kejadian.
2. Penelusuran informasi tentang hubungan-hubungan pribadi dari pada korban dan tersangka. Informasi ini dikumpulkan oleh petugas patroli dari Koban karena mereka inilah yang paling mengetahui segala sesuatunya tentang masyarakat setempat. Tanpa bantuan dari para petugas patroli Koban penyidikan tidak akan berhasil.

Dengan demikian, tingginya clearance rate tadi tidak bisa dipisah-

kan dari efektifitas Koban system karena sistem penyidikan dan bahkan semua kegiatan operasional ke polisian Jepang didasarkan pada Koban systemnya atau dengan kata lain bahwa prinsip "Patrol is the back bone of police operation" diterapkan secara konsekuen di Jepang.

Sehubungan dengan uraian di atas, menurut hemat penulis sangat menarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang apa sebenarnya Koban system sebagai wujud nyata dari community policing yang di Indonesia kini sedang dicanangkan dalam bentuk Infrastruktur Peningkatan Kriminabilitas (IPK). IPK ini telah ditetapkan sebagai strategi Polri dalam meraih Parmas dalam upaya Binkamtibmas yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Polda untuk mengembangkannya.

Ide dasarnya telah dicanangkan oleh Kapolri namun bagaimana bentuk kegiatan operasionalnya secara real di lapangan, tiap Polda masih mencari. Sebagai contoh di Polda Jateng diperkenalkan Babin-kamtibmasdes sebagai model yang terpilih dalam rangka realisasi ide IPK tersebut.

Menurut hemat penulis, tidak ada jeleknya kalau kita mencoba menoleh pada hasil-hasil karya ilmiah yang telah dilakukan para ahli seperti kedua pakar tersebut di atas. Hal ini sejalan dengan penekanan pimpinan Polri bahwa sudah waktunya bagi kita untuk menggarap masalah Kamtibmas secara Scientific dan tidak amatiran. La-

poran hasil penelitian Prof. Skolnick dan Prof. David Bayley telah menemukan 4 learning point sebagai kerangka acuan dalam menerapkan IPK secara nyata. Model konkritnyapun telah ditunjukkan secara sukses oleh kepolisian Jepang dengan Koban systemnya. Sistem ini juga telah dipelajari dan diuji coba oleh kepolisian Singapore dengan modifikasi seperlunya yang telah menampakkan keberhasilan.

Kalau demikian, apa sebenarnya Koban system itu? Secara singkat, Koban system adalah suatu wujud nyata (model) dari penerapan community policing ( IPK ) dengan menampilkan patroli sebagai ujung tombak tunggal dari seluruh operasional kepolisian. Koban merupakan terminal patroli yang tugas pokoknya dititik beratkan pada pelayanan masyarakat secara nyata dan konsekuen serta melaksanakan tugas-tugas yang bersifat non-emergency interaction. Wujud nyata dari non-emergency interaction ini adalah patroli jalan kaki atau bersepeda angin secara teratur dan konsisten setiap harinya.

Dengan demikian, keberadaan/kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sangat terasa dan mengakar dihati masyarakat Jepang yang begitu padat dan metropolis. Keadaan ini sangat kontras dengan di Indonesia karena anggota patroli kita yang berpangkat Bintara dan bahkan Tamtama (terutama di kota besar), malu naik sepeda dan malas jalan kaki waktu berpatroli sementara polisi Jepang sangat bangga dengan patroli jalan kaki dan sepeda mereka. Karena meng-

akarnya kehadiran patroli jalan kaki inilah polisi Jepang mendapat julukan/nama panggilan akrab dari masyarakat "O - mawari - san " (Mr. Walk about) yang artinya "Tuan sipejalan kaki". Dan omawarisan ini telah menjadi simbol ketentraman masyarakat Jepang. Saking populernya nama ini, apabila kita bertanya dimana petugas "keisatsu" (polisi) kepada setiap orang di Jepang, mereka akan reflek menyebut "Omawarisan" sambil menunjukkan arahnya.

Sisi lain yang menarik dari Koban ini adalah bahwa Koban merupakan basis dari seluruh operasi kepolisian. Walaupun petugas Koban tidak dibebani dengan tugas penyidikan namun kebanyakan kegiatan penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik dari Police Station (Polres) maupun dari Prefectural Police Head Quarter (Polda) sebagian besar bermarkas pada Koban. Demikian pula tugas-tugas penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas seperti salah parkir, kebanyakan diemban oleh petugas patroli Koban. Dengan demikian maka walaupun secara organisatoris petugas patroli Koban ini berada di bawah Patrol Division dari Police Station namun mengemban keseluruhan fungsi tugas kepolisian tetapi prioritas utamanya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat non-emergency.

Singkatnya Koban adalah terminal patroli dengan tugas pokoknya adalah Bimmas.

Secara struktur organisatoris, Koban bukanlah unit atau satuan yang merupakan penjabaran organi-

sasi dari Police Station (Polres) seperti halnya Polsek di Indonesia. Tidak ada kepala atau komandan yang permanen di Koban, karena setiap hari berganti sesuai giliran menurut sistem 3 shift dari patroli Police Station.

Inilah perbedaan paling mencolok diantara Koban (Jepang) dengan Polsek (Indonesia). Ketika penulis menanyakan kepada Chief of Sizuoka Prefectural Police Head quarter (Kapolda Sizuoka) dan Chief of Hokaido Prefectural Police HQ (Kapolda Hokaido) mengapa tidak ada Kepala/Komandan permanen di Koban, mereka menjawab bahwa penempatan seorang Komandan permanen pada Koban akan memperpanjang rantai birokrasi dan menyebabkan hambatan dalam pengendalian oleh Chief of Patrol Division dari Polres terhadap petugas patroli Koban. Jawaban ini dibenarkan oleh Pejabat senior di National Police Agency (NPA) of Japan (Mabes Polisi Jepang), bahkan oleh Commissioner General (Kepala Polisi) Jepang dalam suatu kesempatan diskusi.

Jadi kalau kita bandingkan antara Koban di Jepang dengan Polsek di Indonesia maka perbedaan paling mendasar adalah;

1. Secara struktur organisatoris, Koban bukan jabatan dari Police Station (Polres), sementara Polsek dapat dikatakan sebagai duplikat dari Polres.
2. Secara fungsional, Koban mengemban hanya satu fungsi (single function) yaitu patroli tetapi cakupan tugasnya meliputi semua tugas operasional kepelisi-

an dengan titik berat pada Bimmas, sementara Polsek kita mengemban banyak fungsi seperti Reserse, Samapta, dan Bimmas. Sebagai gambaran bagaimana patroli itu diprioritaskan di Jepang adalah komposisi personilnya sebagai berikut; Personil patroli (ditingkat Polda maupun Polres) mencapai 40% dari jumlah seluruh personil sementara Reserse hanya 15%, Lalu-lintas 13%, Crime prevention (Bimmas) 6%. Riot police (Dakhura) 5%, Security 11%, dan 2,4% di bidang administrasi

Penulis tidak ingin membandingkan mana yang lebih baik di antara keduanya karena hal itu masih perlu didiskusikan secara rasional ilmiah bahkan mungkin perlu diadakan suatu studi lapangan sebagaimana telah dicoba oleh Kepolisian Singapore. Kepolisian Singapore telah mengadopsi sistem Koban dengan modifikasi seperlunya setelah mengadakan penelitian dengan metode eksperimen dengan mengambil lokasi pada daerah tertentu di Singapore. Hasilnya ternyata memuaskan dan kini mereka telah menerapkan sistem tersebut secara nasional (dengan komitmen Perdana Menteri), sehingga di Singapore sekarang banyak terdapat Neighbourhood Police Posts (NPPs) yang tidak lain adalah modifikasi dari pada Koban. Langkah yang diambil Kepolisian Singapore tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Jepang mencapai prestasi sebagai the highest clearance rate dan the lowest crime rate adalah bukti nyata efektifitas dari Koban sebagaimana ditemukan oleh

Prof. Skolnick dan Prof. Bayley dalam penelitian mereka terhadap kepolisian diempat benua sebagaimana telah diuraikan di atas.

## KESIMPULAN

Kalau kita lihat secara lebih tajam, kunci keberhasilan penerapan community policing (IPK) di Jepang ada pada media institusionalisasinya. Di Jepang, community policing telah menjadi strategi dasar bagi semua kegiatan operasional kepolisian dan kegiatan nyataanya diletakkan pada fungsi patroli yang diemban oleh petugas Koban sebagai kegiatan utama setiap harinya. Dengan demikian upaya mereka meraih parmas adalah sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Prof. Skolnick dan Prof. Bayley yaitu ; "Don't try to lead to greater public involvement, but show them what kind of activity to increase accountability to local communities" (Jangan berusaha mengendalikannya/memaksakan keterlibatan masyarakat secara lebih besar, tetapi tunjukkanlah kegiatan polisi sendiri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi). Dan untuk itu kepolisian Jepang telah berhasil/menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menarik simpati masyarakat melalui reorientasi patroli.

Menurut hemat penulis, implementasi strategi community policing (IPK) melalui reorientasi patro-

li ini lebih relevan, karena bagaimanapun fungsi patroli adalah media yang paling tua dan populer untuk berinteraksi antara polisi dengan masyarakat di negara mana pun di dunia ini. Kehadiran setiap petugas patroli di manapun dan kapanpun bukan hal yang aneh bagi setiap orang. Dan memang esensi polisi bagi setiap orang adalah kehadiran fisik polisi di samping mereka. Kalau kita melembagakan community policing (IPK) melalui fungsi-fungsi atau aktivitas lainnya (apalagi bersipat baru) maka kemungkinan besar akan timbul kecugraan masyarakat atau setidaknya terasa asing bagi mereka sehingga prinsip "to increase accountability to local community" sulit tercapai. Selain itu pelembagaan community policing (IPK) melalui bentuk kegiatan atau wadah baru akan saling bertumburan dengan bermacam kepentingan dari berbagai macam pihak/instansi lain.

Demikian naskah singkat ini, kiranya dapat bermanfaat dan semoga dapat menjadi bahan diskusi bagi para Perwira dalam upaya kita mengoptimasikan dan mendinamisasikan Polri tercinta ini. Hal ini sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. MOCH.SANUSI agar kita menjadi pemburu-pemburu Ilmu,

# TEKNOLOGI KEPOLISIAN

## KEJADIAN TAKTIS RESPON MENYELURUH OLEH KESATUAN KEPOLISIAN

Dengan adanya unit-unit taktis kepolisian, para pimpinan kepolisian perlu mempertimbangkan untuk menggunakan struktur organisasi baru ke dalam departemen mereka masing-masing. Dengan demikian perkembangan dan pengujian kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, yang sejalan dengan dibukanya garis komando dan komunikasi baru, menjadi sangat perlu. Sebenarnya, unit-unit perorangan menggunakan kebijakan-kebijakan yang secara khusus dirumuskan dan diberlakukan untuk mereka. Kebijakan-kebijakan khusus ini menguraikan tentang bagaimana setiap unit akan dapat berfungsi. Spesialisasi merupakan masalah yang harus dipecahkan.

Dewasa ini, unit-unit taktis dirasakan sangat penting untuk mengantisipasi suatu situasi kritis. Namun demikian, mereka tidak dapat beroperasi sendirian, melainkan bergantung pada dukungan dari unit-unit lain. Situasi kritis mengharuskan semua unit kepolisian untuk bekerja sebagai kesatuan bukan sebagai unit sendiri-sendiri.

Tercapainya kerja sama team-

\*) lih. pada akhir artikel

1) SOPs = Standard Operating Procedures =  
Prosedur-Prosedur Operasi Standar.

work ini sangatlah penting untuk dapat menangkal situasi krisis dengan sukses. Untuk menuju ke sana, digunakanlah satu metode yaitu Standard Operating Procedures (SOPs)<sup>1)</sup> dan kebijakan-kebijakan yang membantu kelompok kerja tersebut dengan melalui program latihan terpimpin, rapat-rapat singkat dan latihan kepekaan terhadap umpan balik (kritik).

Melaksanakan kebijakan-kebijakan dan SOPs ini berarti mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pimpinan. Misalnya, SOPs secara jelas menentukan siapa yang mempunyai wewenang di tempat terjadinya suatu peristiwa dan pengetahuan ini dipertegas/diperkuat selama mengikuti latihan karena wewenang tersebut mungkin tidak akan dipertanyakan lagi selama menangani suatu kejadian krisis yang sebenarnya. Dengan cara yang sama, menyusun suatu konsep tim (kelompok kerja) berarti membantu memperkecil kecemburuan para petugas yang bertugas pada bagian non taktis.

Artikel ini akan menguraikan pentingnya kegiatan penindakan kepolisian yang terkoordinasi terha-



dap situasi-situasi krisis dan pentingnya partisipasi dalam setiap kejadian. Artikel ini juga akan menguraikan tentang bagaimana berlatih, melaksanakan prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang tepat, kritik/umpan balik dan rapat-rapat singkat dapat meningkatkan kegiatan penindakan kepolisian secara menyeluruh terhadap situasi-situasi krisis.

## **Tindakan Tim Dalam Menghadapi Suatu Krisis**

### **Petugas-Petugas Perhubungan**

Kesatuan Perhubungan merupakan pos pertama yang mengadakan komunikasi pada kebanyakan situasi krisis. Sebenarnya tindakan yang khas dari kesatuan ini dimulai dengan memberitahu petugas perhubungan yang kemudian menyiarkan fakta-fakta kepada unit-unit patroli, para penyidik, anggota-anggota unit taktis, petugas-petugas negosiasi, dan petugas-petugas penting lainnya yang bertugas. Pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif pada seluruh kejadian tidak dapat dijelaskan secara secukupnya. Dan karena kebanyakan komunikasi di antara unit-unit yang mengadakan penindakan terhadap suatu kejadian krisis dilakukan melalui petugas perhubungan, maka peran posisi ini pada setiap krisis sangatlah penting dalam konsep tim. Sebenarnya kebanyakan komunikasi di antara unit-unit yang sedang menindak suatu krisis dilakukan

melalui petugas komunikasi.

### **Unit-Unit Patroli**

Unit-unit patroli yang cepat memberikan respon itu diharapkan dapat menyelesaikan kejadian sebelum meningkat menjadi situasi krisis. Informasi intelijen selanjutnya serta penggunaan prosedur penahanan yang benar sangatlah penting seandainya krisis semacam itu timbul. Respon yang tidak tepat yang dilakukan oleh unit-unit yang terlibat dapat membahayakan operasi secara keseluruhan.

Saat yang paling menentukan dari suatu situasi krisis berada pada tanggung jawab para petugas yang pertama kali mengamankan TKP. Target yang harus dicapai oleh petugas adalah mengisolasi dan menganalisis serta mengamankan kejadian tersebut; meminta kepada tim taktis bila perlu; dan mengumpulkan informasi intelijen yang ada. Dengan cara lebih dulu menilai situasi dengan memperhatikan keamanan masyarakat dan petugas, mencegah warga masyarakat agar tidak merusak TKP dengan membuat pagar sementara berupa lingkaran yang mengelilingi TKP, dan mengumpulkan serta meneruskan informasi-informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, berarti petugas-petugas yang menangani TKP pertama kali telah menciptakan mata rantai yang sangat penting dalam upaya polisi secara keseluruhan mengatasi situasi krisis tersebut.

## Para Penyidik

Biasanya, pada saat para penyidik datang di TKP, petugas yang menangani pertama kali harus sudah mengumpulkan informasi dan telah menguasai kejadian itu. Informasi-informasi ini sering menguraikan tentang jenis-jenis senjata yang digunakan, lokasi tersangka, dan apakah terdapat sandera. Oleh karena itu, para penyidik harus menerima informasi ini dari petugas-petugas yang menangani TKP pertama kali dan kemudian mewawancarai orang-orang yang sekiranya dapat dijadikan saksi untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Informasi tersebut kemudian harus disajikan kepada unit-unit lain yang terlibat, khususnya unit taktis yang misinya dan rencananya mungkin sangat bergantung pada informasi demikian ini. Unit-unit taktis tidak boleh menjadi unit intel-nya sendiri dan sebagai unit taktis, harus mengandalkan unit lain yang ditugasi tanggung jawab ini.

## Petugas Taktis dan Negosiasi

Tentu saja, unit taktis dan tim negosiasi sandera merupakan bagian-bagian integral dari kegiatan setiap kesatuan kepolisian dalam menghadapi suatu krisis. Peran unit taktis sangatlah penting bila suatu kejadian mencapai titik tertentu yang mungkin memerlukan suatu penyerbuan. Hal yang sama berlaku pula bagi tim negosiasi yang menangani masalah penyanderaan.

Sampai pada titik ini dalam krisis tersebut, semua unit yang lain menjadi bergantung pada satu unit penyerbuan yang terorganisir yang bekerja sama dengan satu tim negosiasi yang berpengalaman.

Tentu setiap pimpinan kepolisian akan lebih menyukai mengatasi situasi-situasi ini melalui negosiasi yang baik yang diharapkan membuat para pelaku menyerah. Tetapi sering kali hal ini tidak terjadi dan penggrebegan/penyerbuan taktis menjadi satu-satunya alternatif. Pada kejadian demikian misi unit-unit taktis adalah melindungi semua yang terlibat dan menangkap atau melumpuhkan para tersangka. Namun demikian anggota-anggota lain dari kesatuan kepolisian tersebut harus mengetahui tentang bagaimana unit-unit taktis beroperasi dan tentang batas-batas wewenangnya bila melaksanakan penggrebegan/penyerbuan yang terkoordinasi.

## Tim K-9

Tim K-9 telah membuktikan dirinya bahwa keberadaannya dipandang sangat berguna dalam situasi-situasi taktis. Mereka dapat digunakan untuk melokalisir para tersangka yang menggunakan perintang-perintang dan mengurung diri. Mereka bertindak sebagai tim serbu/sergab dan yang melakukan penangkapan, tim yang bertugas mengalihkan perhatian, dan yang melakukan ancaman psikis terhadap para pelanggar. Seperti halnya unit-unit taktis, unit-unit yang lain harus

juga mengetahui tentang penggunaan Tim K-9 sehingga seluruh kegiatan penindakan oleh kepolisian dapat dikoordinasikan secara efektif.

**Metode yang digunakan untuk meningkatkan tanggapnya tim terhadap suatu keadaan kritis**

### **Latihan**

Latihan yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk memberi respon terhadap situasi-situasi krisis. Pada kebanyakan kesatuan, unit taktis berlatih secara teratur, kadang-kadang dengan para petugas negosiasi sandera, K-9 dan unit-unit khusus lainnya.

Sayangnya kebanyakan kesatuan kepolisian tidak melibatkan petugas patroli atau para penyidik dalam jenis latihan seperti ini. Bagi anggota unit taktis, di samping tidak meremehkan kebutuhan latihan dengan senjata taktis khusus dan piranti-piranti yang lain, latihan bersama dengan unit-unit lain dalam menanggulangi keadaan-keadaan kritis, harus pula diadakan secara teratur dan kontinyu (reguler). Dengan melibatkan unit-unit lain dalam program latihan ini, kegiatan respon yang tepat dapat dijamin.

Selama latihan, unit taktis harus pula mendemonstrasikan penggunaan beraneka ragam taktik dan teknik seperti teknik pengalihan perhatian, penggunaan senapan mesin, dan alat pendobrak pintu sehingga

yang lainnya dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hasilnya, kepercayaan petugas-petugas lain terhadap unit taktis dan kepada peralatannya akan lebih kuat.

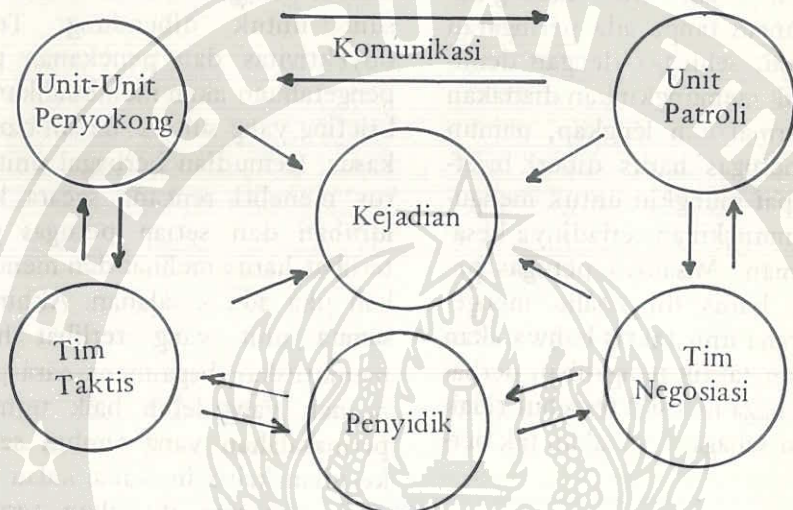
Latihan selama bertugas di lapangan dengan petunjuk-petunjuk lengkap yang berkaitan dengan situasi krisis, juga sangat bermanfaat. Kesatuan kepolisian harus mempertimbangkan melibatkan semua unit dalam skenario-latihan yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataan setidaknya 2 kali setahun. Namun demikian harus dijaga bahwa semua petugas memahami benar sifat peran masing-masing serta keterkaitan peran-peran itu. Video tape yang merekam dan menayangkan program latihan ini juga akan sangat berguna.

### **Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-Prosedur**

Banyak kesatuan kurang mempunyai kebijakan menyeluruh untuk mengadakan koordinasi dalam operasi-operasi taktis. Oleh karena itu, kesatuan harus merinci kebijakan-kebijakan, SOPs, dan prosedur untuk mengatasi situasi-situasi taktis, seperti pembagian kerja antara tiap-tiap unit dan menguraikan bagaimana unit-unit itu masing-masing serasi dalam rencana kegiatan keseluruhan. Lagi pula, karena garis komando dapat berubah di tempat kejadian, suatu kebijakan tertulis yang mencakup bidang ini akan mengkoordinasikan secara efektif

operasi tersebut dan menghindari terjadinya kebingungan mengenai siapa yang pegang komando. Prinsip tentang masalah komando harus

dinyatakan secara jelas dalam SOPs dan diperkuat lagi dalam latihan-latihan serta diskusi setelah kejadian usai.



// Situasi-situasi kritis mengharuskan semua unit kepolisian untuk bekerja sebagai kesatuan bukan sebagai unit sendiri-sendiri. //

### Umpan balik (kritik) dari luar

Peka terhadap kritik yang bersifat membangun dari sumber-sumber di luar kesatuan dapat berguna dalam merumuskan suatu rencana penyempurnaan. Misalnya, hampir tanpa kecuali, kejadian-kejadian menyolok akan merebut perhatian media massa. Sebenarnya media massa sering ingin menulis tajuk rencana mengenai bagaimana suatu kejadian dapat ditangani secara lebih baik. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak perlu bersikap defen-

sif melainkan hendaknya bersikap seobyektif mungkin untuk menanggapi dengan hati-hati terhadap setiap komentar. Seringkali, informasi yang bermanfaat diperoleh dari taju-taju rencana semacam itu dan dapat digunakan pada latihan berikutnya.

### Briefing dan Debriefing

Setiap kejadian kritis dapat dipandang sebagai suatu kesempatan untuk belajar dan menyiapkan diri untuk penanganan kejadian yang

akan datang. Briefing sebelum dan debriefing setelah kejadian usai sangat efektif dalam hal ini dan dapat membantu memperkuat kerja sama di antara unit-unit. Meskipun kejadian-kejadian itu kadang-kadang muncul tanpa ada peringatan lebih dulu, sehingga dengan demikian tidak memungkinkan diadakan rapat formal dan lengkap, namun semua petugas harus diberi briefing secepat mungkin untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-pahaman. Misalnya petugas pengepung harus diberitahu mengenai rencana unit taktis bahwa akan digunakan taktik pengalihan perhatian sehingga maksud tersebut tidak diartikan sebagai tembakan tak bersahabat.

Jadi tidak hanya unit taktis saja yang harus mengikuti tanya jawab setelah aksi penggrebagan-penggrebagan, melainkan semua petugas yang terlibat seperti petugas patroli, para penyidik, anggota Tim K-9 dan petugas perhubungan. Pada saat debriefing berlangsung, para petugas harus mendiskusikan apa yang salah dan (sama pentingnya) apa yang baik selama kejadian kritis itu ditanggulangi. Sekalipun emosi yang meledak-ledak mungkin timbul, namun pada akhirnya hasil akhir akan menjadi bahan proses belajar yang obyektif.

Debriefing yang wajar biasanya mencakup pula pengenalan masalah dan keberhasilan, pengakuan akan kekurangan secara intern, pengaku-

an akan masalah-masalah kepada pihak lain dan mengembangkan pemecahan persoalan. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan karena adanya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau diri sendiri sulit untuk dibendung. Tetapi obyektivitas dan penekanan pada pengetahuan akan membuahkan debriefing yang sukses dalam banyak kasus. Kemudian berbagai unit harus meneliti rencana secara keseluruhan dan setiap petugas yang terlibat harus melihat dan menemukan jika ada kesalahan. Akhirnya, semua unit yang terlibat harus memutuskan bagaimana cara penanganan yang lebih baik terhadap permasalahan yang timbul selama kejadian kritis ini kalau-kalau kejadian semacam itu akan terulang kembali.

### Kesimpulan

Spesialisasi yang meningkat dalam kesatuan kepolisian di seluruh negeri memungkinkan mereka untuk mengatasi situasi-situasi yang luar biasa dengan keahlian yang lebih besar. Namun demikian, masih terdapat contoh-contoh yang menunjukkan kerja sama memudar di tempat terjadinya situasi kritis. Tetapi dengan adanya rencana kesatuan yang spesifik, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan dan SOPs, kesatuan-kesatuan kepolisian dapat menghindari kekurangan-kekurangan yang demikian dan dapat mengembangkan dan menggunakan beraneka ragam keterampilan secara

maksimal.

Waktu terus berjalan, pengenalan terhadap teknologi baru akan menggiring kita ke arah spesialisasi yang lebih meningkat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, spesialisasi menjadi lebih penting bila setiap bidang keahlian bekerja sama yang satu dengan yang lainnya demi tercapainya tujuan penegakan hukum. Hanya dengan melalui kelompok kerja dan kerja sama yang erat antara semua bidang keahlian dalam penegakan hukum, instansi-instansi penegakan hukum dapat menyelesaikan situasi-situasi kritis dengan hasil baik.

#### Footnotes.

1. James W. Stevens and David W. Mac-Kenna. "Assignment and Coordination of Tactical Units", FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 58, No. 3, March 1989, pp. 2-9.

2. Ibid.

3. John T. Dolan and G. Dwayne Fuselier, "A Guide for First Responders to Hostage Situation", FBI Law Enforcement Bulletin, Vol. 58, No. 4, April 1989, pp. 9-13.

4. Captain Wade Y. Ishimoto, "Intelligence Support of SWAT Operation", The Tactical Edge, vol. 2 No. 1, Winter 1984, pp. 7-11.

5. Van Ness H. Bogardus III. "The Application of K-9's to SWAT Operations", The Tactical Edge, vol. 1, No. 1, Fall 1983, pp. 19-22.

6. Donn Kraemer, "The Application of Police Canines to Tactical Operations," The Tactical Edge, vol. 5, No. 1, Winter 1987, pp. 39-41.

\*) Terjemahan bebas Sri Wahyudi, Artikel Nicholas F Kaiser, MA dalam FBI Law Enforcement Bulletin.

# LENSA KAMTIBMAS



## LINGKUNGAN YANG TERCEMAR

Masih banyak keluarga yang bersempat tinggal dengan fasilitas yang kurang memadai. Mereka menempati gubuk-gubuk di bawah jembatan yang sangat kontras dengan penampilan gedung-gedung di dekatnya.

Gambar : Pemandangan dibawah jembatan kereta api Manggarai yang cukup memprihatinkan.